

ABSTRAK**KEWENANGAN BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR DALAM PENGAWASAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA
DI JAWA TIMUR****Oleh:****ISTANA WAPRESINA, S.H.****031141076**

Penelitian ini menggunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan “*conceptual and statute approach*”. Melalui pendekatan tersebut, dalam penelitian ini dilakukan pengkajian secara kritis terhadap Kewenangan Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan Klarifikasi terhadap Produk Hukum Daerah.

Penelitian ini berorientasi pada upaya mengkaji bentuk pengawasan represif berupa klarifikasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di lingkup Kabupaten/Kota. Adapun klarifikasi merupakan wewenang Gubernur yang dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan, sehingga penelitian diarahkan pada alasan penolakan terhadap produk hukum daerah yang dihasilkan Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi dan akibat hukum bagi Gubernur, Bupati/Walikota dan produk hukum daerah yang tidak dilakukan klarifikasi.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa alasan penolakan terhadap produk hukum daerah yang harus dilakukan klarifikasi meliputi ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia yang terbatas, jangka waktu yang dibatasi dan keterlambatan Kabupaten/Kota dalam melakukan penyampaian produk hukum daerah kepada Gubernur. Sedangkan akibat hukum hanya dapat dikenakan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang tidak mengindahkan mekanisme klarifikasi yaitu masing-masing berupa pengambilalihan wewenang oleh Menteri Dalam Negeri dan peneraan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari

Gubernur. Khusus untuk produk hukum daerah yang tidak diajukan klarifikasi dinyatakan tetap sah dan berlaku.

Kata Kunci : Wewenang, Pengawasan dan Otonomi Daerah.



ABSTRACT**KEWENANGAN BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR DALAM PENGAWASAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA
DI JAWA TIMUR****By:****ISTANA WAPRESINA, S.H.****031141076**

This study uses a normative legal research approach " and the statute conceptual approach" .Through these approaches , in this study conducted a critical assessment of the authority of the Governor through the Legal Bureau of East Java Provincial Secretariat in implementing Clarification of district regulations

This study examines the efforts oriented repressive form of supervision in the form of a clarification of the Local Rules and Regulations Regional Head in the scope of the district / city . The clarification is the authority of the Governor that in practice cause problems , So that the research is directed at the reasons for the refusal of the local regulations produced Regency / City for clarification and legal consequences of the Governor , the Regent / Mayor and local regulations that are not done clarification .

This study stated that the reason for the rejection of local regulations that must be clarification include the availability of budget and human resources are limited , limited period of time and the delay District / City in conducting the delivery of local regulations to the Governor . While the legal consequences can only be subjected to the Governor and Regent / Mayor who does not heed the mechanism clarification that each form of takeover authorized by the Minister of the Interior and the imposition of administrative sanctions in the form of a written

warning from the Governor . Especially for local regulations that are not proposed clarification otherwise remain valid and enforceable

Keywords: Authority, Monitoring and Autonomy.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur yang tiada terkiranya kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Minat Studi Hukum Pemerintahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Tidak ada sebuah keistimewaan dari sebuah ilmu, jika tidak bisa membuat perubahan dan penyempurnaan dihadapan realitas. Hari ini kita masih melihat bahwa hukum Indonesia masih butuh perbaikan dan penyempurnaan. Begitu halnya karya tulis berupa Tesis ini, penulis merasa terlalu jauh untuk menjadi jawaban atas problematika hukum yang dihadapi kita pada saat ini.

Penyusunan Tesis dengan judul “KEWENANGAN BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENGAWASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA DI JAWA TIMUR” dapat diselesaikan berkat bimbingan dan arahan dari Bapak Dr. SUKARDI, S.H., M.H. yang telah membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini. Kemudahan penulis ini dalam menemui dan meminta pembimbingan beliau merupakan faktor utama selesainya penyusunan tesis ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi beliau.

Atas tersusunnya tesis ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, seperti :

1. Bapak Prof. Dr. Fasich, Apt, yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini melalui fasilitas yang memadai seperti perpustakaan. Kelengkapan koleksi buku maupun koleksi tesis dan disertasi di perpustakaan Kampus B Unair, membuat penulis dengan mudah menemukan bahan hukum yang dibutuhkan.
2. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memudahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini melalui kelengkapan fasilitas yang dimiliki

Fakultas Hukum Universitas Airlangga seperti Koleksi Khusus dan Law Book Store tempat penulis mencari dan menemukan bahan hukum.

3. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., sebagai ketua program Studi Magister Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah menyediakan sistim pendidikan dan kurikulum perkuliahan yang sangat berkualitas serta berkenan menyetujui judul proposal tesis yang diajukan penulis.
4. Ibu Zendy Wulan Ayu W. P., S.H., LL.M., selaku dosen Mata Kuliah Penunjang Tesis yang telah berkenan membimbing penulisan dalam penyusunan Bab II Tesis ini.
5. Ibu Endang Sayekti, SH., M.Hum., selaku dosen Penguji Tesis ini. selaku dosen Penguji Tesis ini. Yang telah bersedia menguji dan membimbing tesis hingga akhir.
6. Yang sangat terpelajar dan terhormat Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.H., Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.H., serta para pengajar di Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membagikan ilmunya.
7. Untuk kedua orang tuaku, Ayahanda (Alm.) Genot Suhari dan Agus Pudji Walujo serta Ibunda Sumiati dan Sunarsih terima kasih yang sangat mendalam atas semua cinta dan kasih sayangnya dalam memberikan motivasi dan menjadi inspirasiku.
8. Untuk suami dan anak –anaku yang kusayangi dan kucintai. Suamiku Erry Surya Buana yang telah bersama sama menempuh kuliah S2 bersama sama denganku dan kedua buah hatiku Arsy Fajar Putra dan Muhammad FathirHaziz yang menjadi sumber penyemangatku.
9. Saudara-saudaraku, Ervita Mega Sari dan Arya Wisnu Murti yang selalu bersemangat.

10. Untuk semua teman-teman dibangku kuliah Program Studi Pemerintahan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga khusus Angkatan 2011, terimakasih banyak atas semua bantuan yang diberikan kepada saya.

Demikian ucapan terimakasih dan serta penghargaan setinggi-tingginya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal sesuai dengan amal dan perbuatan masing-masing, namun kembali penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih terapat banyak kekurangan dan kelemahan, namun sebagai manusia biasa tidak luput dari kehilafan. Penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi pembaca sekalian.

Surabaya, Januari 2015

ISTANA WAPRESINA, S.H.
031141076